



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ST. FAUZIAH**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN KIMIA**
3. NHK : **869683**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 901.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 585.600.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 97.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD.MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERTAGIH **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 23.100.699**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.021.700.699**



III. HUTANG

Rp. 379.751.745

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 641.948.954

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.